

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia terdiri dari berbagai wilayah provinsi yang dibagi menjadi banyak kabupaten dan kota. Tiap provinsi, daerah, dan kota memiliki Pemerintah Daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah adalah entitas yang pertanggungjawaban kinerjanya dipertaruhkan dalam membuat laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban untuk suatu entitas daerah. Namun, masih banyak terdapat kasus mengenai buruknya laporan keuangan di Indonesia yang menjadi pemicu diperlukannya pengkajian lebih dalam. Hal ini tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan profesionalisme. Jika faktor-faktor tersebut tidak diterapkan secara maksimal akan memberi pengaruh yang buruk pada laporan keuangan keuangan daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Pasal 1 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 adalah

“Proses pelaporan keuangan yang berisi sebuah catatan akuntansi pada suatu entitas dalam periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja pada suatu entitas”

Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara Tahun 2003 mengatur tentang bentuk penyelenggaraan pemerintahan Upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah melalui penyampaian laporan keuangan. Setiap tahun, Laporan Keuangan Daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengatur Keuangan (BPK) agar penyajiannya adil dan berkualitas. Kepala SKPD menerapkan sistem pertanggungjawaban keuangan terkait dengan integritas keuangan, keterbukaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tercermin dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan akan dipertanggungjawabkan kepada Bupati / Walikota dan Gubernur. (Soeradi, 2014).

Saat menyiapkan laporan keuangan berkualitas tinggi, harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual tahun 2010. Dasar basis akrual adalah dimana pengaruh transaksi dan

peristiwa diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dibukukan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (Bastian, 2006). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Hal ini bersifat wajib dan mutlak karena standar akuntansi pemerintah dibuat sebagai dasar penyusunan setiap laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia memiliki standar yang sama dan dapat ditingkatkan kualitasnya.

Dalam penyusunan laporan pemerintah, diperlukan pula Sistem Pengendalian Intern. , Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Terdapat beberapa masalah yang ditemukan terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan, yaitu: pencatatan belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sistem informasi akuntansi, pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, dan terlambatnya menyampaikan laporan. Keadaan

tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum optimal.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang belum mencapai kondisi terbaik memang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai "sumber" kekuatan yang dapat digunakan organisasi (Meldona, 2009).

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan bahwa “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan”. Profesionalisme dapat dicerminkan ke dalam lima hal, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Jika kelima hal itu dapat direalisasikan maka adanya profesionalisme akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan profesionalisme merupakan faktor yang penting untuk mencapai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan 4 opini BPK yang akan

menunjukkan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Variabel-variabel dalam penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian terdahulu. Yusriani (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal. Penelitian lain dilakukan oleh Nasution (2020) mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Lalu Sipayung (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Penelitian lainnya yaitu dilakukan oleh Hendri dan Erinos (2020) mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan

penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem informasi manajemen daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun penelitian lain yang dilakukan Latifah (2020) yaitu mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Penelitian lain dilakukan oleh Sartika (2017) yaitu mengenai pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Gowa.

Dari latar belakang dan penelitian di atas, peneliti ingin menguji hasil penelitian dari lima peneliti terdahulu dengan menggabungkan dari beberapa variabel agar hasil penelitian ini bisa lebih relevan dan dapat dijadikan generalisasi pada hasil penelitian selanjutnya. Alasan peneliti memilih Kabupaten

Jember karena pada tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur memberikan penilaian tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) karena saat dilakukan pengawasan oleh DPRD Jember, banyak penyalahgunaan anggaran dalam Pemerintah Kabupaten Jember. (<https://regional.kompas.com/read/2020/06/30/13464711/hasil-audit-bpk-pemkab-jember-raih-laporan-keuangan-terburuk>). Oleh karena itu, peneliti menggunakan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?
4. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menguji kembali variabel-variabel terdahulu dengan menggunakan subjek penelitian yang baru yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan waktu yang berbeda.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk kajian bagi peneliti selanjutnya, khususnya dibidang akuntansi keuangan daerah.

#### **2. Manfaat Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kualitas laporan keuangan bagi pemerintah daerah.